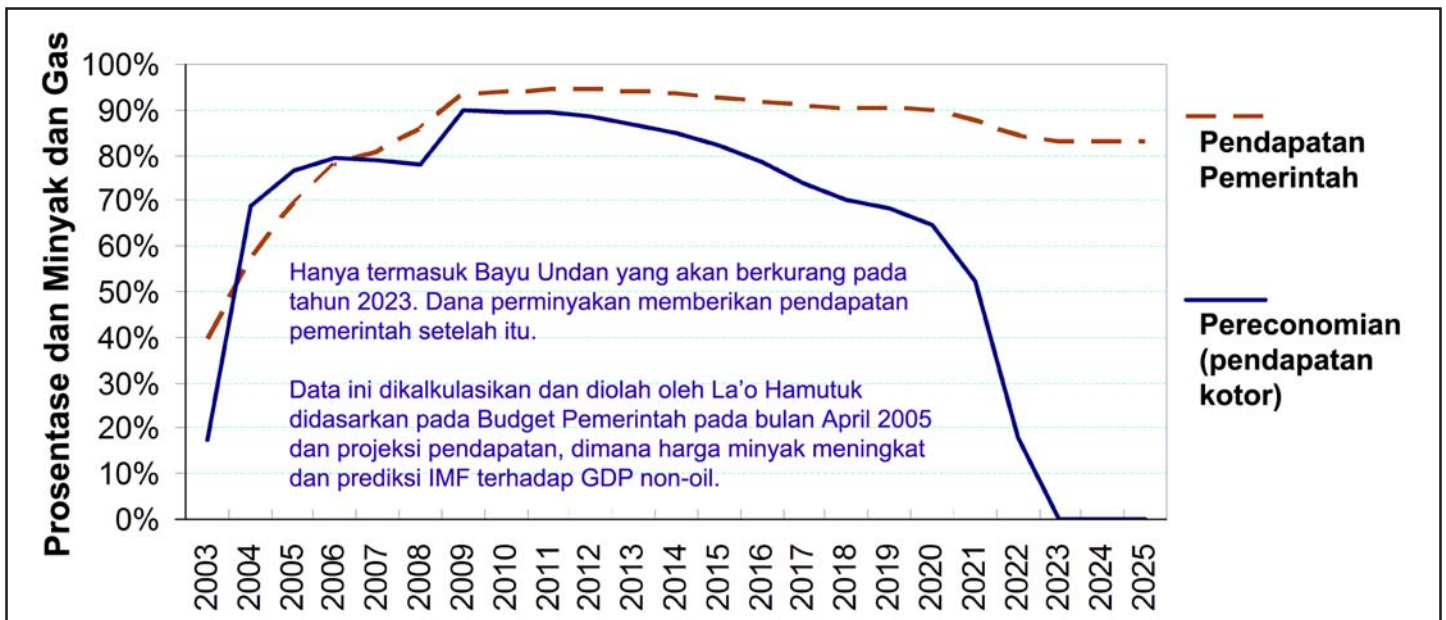


Timor-Leste akan menjadi negara di dunia yang paling tergantung pada minyak

Lima tahun mendatang, Timor-Leste akan menjadi negara di dunia yang paling tergantung pada minyak, dengan 89% dari ekonominya (GDP) dan 94% dari pendapatan pemerintah diperoleh dari penjualan minyak dan gas. Ini berdampak serius pada pembangunan ekonomi di masa depan dan pada kehidupan masyarakat kita.

Dalam beberapa dekade terakhir, umat manusia sudah belajar bahwa minyak dan gas tidak memberikan berkah seperti yang diidamkan oleh banyak orang, khususnya untuk mereka yang hidup di negara-negara yang memiliki minyak. Di banyak tempat, minyak merupakan faktor utama penyebab penderitaan, krisis politik, kerusakan lingkungan dan kesenjangan ekonomi, yang mengakibatkan rusaknya keamanan – internal maupun eksternal, lokal maupun global, pribadi maupun nasional. Di seluruh dunia, dampak-dampak di atas paling parah di negara-negara dimana minyak dan gas merupakan bagian terbesar dari perekonomiannya. Ketika ekspor minyak dan gas lebih besar dibandingkan dengan ekspor lain, dan kontribusi minyak dan gas merupakan bagian terbesar bagi kegiatan pemerintah, maka negara tersebut adalah negara yang tergantung pada minyak.



Informasi dalam grafik ini diperoleh dari makalah latar belakang Kementerian Perencanaan dan Keuangan (RDTL) untuk Pertemuan Mitra Pembangunan bulan April 2005, yang digabungkan dengan Proyeksi IMF Juli 2005 mengenai pertumbuhan ekonomi non-minyak. Kami menyesuaikannya dengan perkiraan peningkatan harga minyak.¹ (Catatan di halaman 4).

Garis tidak putus-putus menggambarkan bagian yang diperoleh Timor-Leste dari produksi Bayu-Undan sebagai prosentase dari ekonomi total Timor-Leste (GDP). Jika Greater Sunrise dan ladang-ladang lainnya dibangun, Timor-Leste akan lebih tergantung pada minyak.

(bersambung ke halaman 2)

Daftar Isi . . .

Sistem perundangan-undangan minyak penuh lubang kelemahan	5
Aksi solidaritas untuk Burma	10
Keluarga korban mengunjungi Indonesia	12
Keadilan “yang mudah dipraktekkan”	13
Laporan perkembangan manusia	14
Organisasi Perdagangan Dunia diungkapkan	15
Editorial: Bantuan Australia tidak boleh membatasi kebebasan berbicara	16

	2005	2010	2025	
Penduduk	947.000	1.216.500	1.938.000	Pertumbuhan penduduk alamiah tertinggi di dunia, tingkat kesuburan rata-rata delapan anak per perempuan.
GDP Minyak	\$925	\$3.800	0	Hanya mencakup ladang Bayu-Undan. Ladang-ladang lain akan melipatduakan pendapatan minyak Timor-Leste dan atau memperpanjang periode produksi.
GDP Non-minyak	\$349	\$452	\$714?	2025 tergantung pada bagaimana perkembangan sektor-sektor ekonomi lain. 2010 berdasarkan pada proyeksi IMF.
% minyak dalam ekspor	99,0%	99,6%	0%	Mengandaikan 5% pertumbuhan tahunan ekspor non-minyak.
% minyak dalam GDP	73%	89%	0%	Ini tidak termasuk bunga dari investasi dana pendapatan dalam Dana Perminyakan, yang akan semakin penting dengan berjalannya waktu, dan mungkin membantu menggantikan pendapatan dari minyak ketika minyak habis.
% minyak dalam pendapatan pemerintah	65%	94%	79%	Termasuk bunga Dana Perminyakan. Tidak semua pendapatan dari minyak akan digunakan; surplus akan diinvestasikan di luar negeri.

Garis putus-putus menggambarkan pendapatan minyak (dari produksi minyak dan bunga Dana Perminyakan) sebagai prosentase dari pendapatan pemerintah. Grafik ini mengandaikan bahwa pemerintah tidak menghabiskan semua pendapatannya setiap tahun, tetapi akan mengikuti kebijakan yang dinyatakannya, yaitu hanya menggunakannya secara berkelanjutan. Akibatnya pemerintah akan tetap tergantung pada pendapatan dari minyak (dari Dana Perminyakan), meskipun produksi minyak telah habis. Minyak dan gas di Bayu-Undan akan habis pada tahun 2023; jika ladang-ladang lain seperti Greater Sunrise dikembangkan tidak lama lagi akan habis pada tahun 2050 atau sebelumnya.

Alasan mendasar mengapa Timor-Leste sangat tergantung pada minyak bukan bahwa kita memiliki minyak dan gas yang begitu banyak, tetapi karena sektor lain dari perekonomian kita sangat kecil dan pertumbuhan pada dasarnya mendatang diperkirakan kecil.

Saat ini, kegiatan ekspor non-minyak sangat kecil. Tahun 2004, nilai ekspor Timor-Leste hanya sebesar \$7 juta; hampir

semuanya adalah kopi. Selama periode yang sama, nilai impor Timor-Leste sebesar \$113 juta. Hampir sepertiga dari impor Timor-Leste adalah minyak fosil dan 53% dari semua barang diimpor dari Indonesia.

Di atas adalah statistik dan proyeksi dasar. Semua angka uang dalam jutaan dolar Amerika Serikat.

Pendapatan minyak dan gas akan menjadi bagian terbesar perekonomian dan pendapatan pemerintah Timor-Leste untuk satu generasi, tetapi tabungannya akan melemah dalam waktu dekat. Karena Bayu-Undan terletak di laut dan pengolahan hilir (pencairan gas) dilakukan di Australia, pendapatan dari kegiatan lain yang terkait sangat kecil kemungkinannya akan masuk ke Timor-Leste, dengan sedikit keuntungan ekonomi sekunder. Timor-Leste telah mengalami gejala ini – lebih dari dua milyar telah dihabiskan di Timor-Leste oleh PBB dan badan-badan bantuan selama enam tahun ini tidak berpengaruh ekonomi yang panjang, meskipun secara kasar melipatduakan seluruh GDP non-minyak mulai 2000 sampai 2003.

Harga Minyak

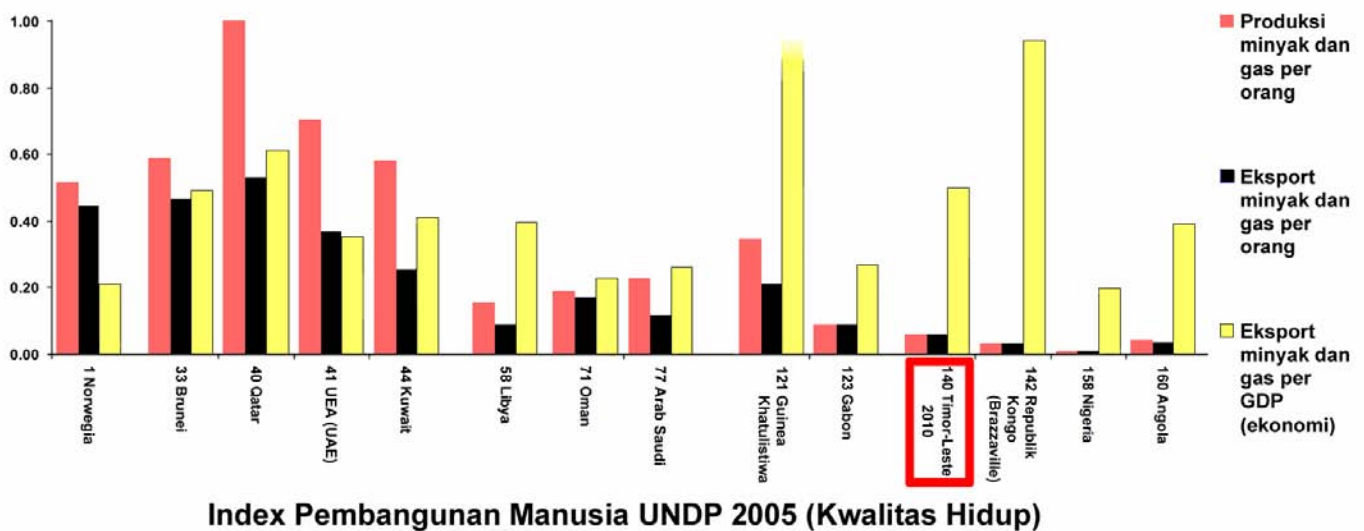
Beberapa bulan terakhir, para pengendara motor dan mobil di Timor-Leste, sama seperti pengendara lain di seluruh dunia terpuak berat dengan naiknya harga minyak. Hal ini dirasakan oleh pengemudi bemo dan taksi, dan lainnya, menimbulkan kesulitan bagi banyak orang.

Tetapi pada kenyataannya, tingginya harga minyak baik bagi Timor-Leste. Jika harga minyak meningkat dari 60 sen/liter menjadi 80 sen/liter, ini akan meningkatkan biaya tambahan untuk rakyat dan pemerintah Timor-Leste hampir \$12 juta per tahun, dengan meningkatkan biaya impor minyak. Tetapi karena Timor-Leste mengekspor lebih banyak minyak (dalam bentuk minyak dan gas alam) daripada impornya, harga ini akan meningkatkan pendapatan Pemerintah pada tahun 2005 sebesar \$100 juta. Pemerintah belum mengimplementasikan kebijakan untuk mengurangi beban bagi konsumen bahan bakar dengan membagi keuntungan, walaupun itu dapat dilakukan.

Pada saat ini, ekspor minyak Timor-Leste 24 kali lipat impornya; dalam lima tahun mendatang akan menjadi 80 kali. Meskipun mayoritas uang dari ekspor minyak masuk ke perusahaan-perusahaan minyak internasional, pemerintah Timor-Leste menerima sekitar seperempat, dan karena itu juga mendapatkan keuntungan ketika harga minyak meningkat.

Timor-Leste menciptakan suatu perekonomian ekspor minyak pada saat minyak dunia harganya sangat tinggi, yang bisa mengakibatkan pengharapan yang tidak realistis mengenai pendapatan minyak di masa mendatang. Pihak yang berwenang harus melindungi terhadap kepuasan, karena harga minyak bisa menurun secara signifikan. Tetapi minyak dan gas di seluruh dunia adalah sumber alam yang terbatas, dan harga minyak dunia kemungkinan akan terus meningkat dalam jangka panjang.

Ketergantungan Terhadap Minyak dan Pembangunan Manusia



Grafik menunjukkan informasi dasar tentang negara-negara yang paling tergantung pada minyak.³ Disusun dari kiri ke kanan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI), dengan yang di bagian kiri adalah negara-negara yang memberikan kehidupan terbaik bagi rakyatnya. Nomor di samping setiap nama negara adalah peringkat Indeks Pembangunan Manusianya, dari 1 sampai 171, dibandingkan dengan semua semua negara lain.

Semua data perminyakan, penduduk, dan ekonomi adalah untuk tahun 2004, kecuali untuk Timor-Leste yang diproyeksikan untuk tahun 2010 ketika produksi Bayu-Undan mencapai puncaknya. Indeks Pembangunan Manusia Timor-Leste tahun 2005 adalah 140; apakah pada tahun 2010 akan naik atau turun, sangat tergantung pada seberapa bijaksana uang hasil ekspor minyak digunakan.

Setiap negara memiliki tiga batang:

1. Batang kiri (abu-abu) menunjukkan berapa banyak minyak dan gas yang diproduksi, dibagi penduduk. Ini menunjukkan kemungkinan bahwa pendapatan dari minyak dan gas akan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.
2. Batang kedua (hitam) mengindikasikan berapa banyak minyak dan gas yang diekspor per tiap orangnya. Jika itu sama tingginya dengan batang pertama, berarti negara tersebut mengeksport hampir semua minyak dan gasnya.
3. Batang ketiga (putih) menunjukkan jumlah minyak yang diekspor negara yang bersangkutan dibagi dengan Produksi Domestik Kotor (GDP). Semakin tinggi batangnya menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut semakin tergantung pada ekspor minyak dan gas. Data untuk Guinea Khatulistiwa tidak bisa diandalkan, karena itu batangnya tidak pasti, walaupun sangat tinggi.

Di negara-negara lain

Sangat sedikit negara yang tergantung pada uang dari minyak dan gas seperti Timor-Leste (perhatikan grafik pada halaman berikutnya). Di antara negara-negara yang ekspornya paling kurang tiga per empat dari minyak mentah dan gas alam (Timor-Leste akan mengeksport sekitar 99%), hanya sedikit negara yang memberikan kehidupan yang baik kepada penduduknya, menurut Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index – HDI) UNDP.² Norwegia, Brunei Darussalam, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait merupakan negara-negara yang tergantung pada minyak yang termasuk dalam seperempat teratas HDI, dan mereka masing-masing menghasilkan lebih dari sembilan kali minyak dan gas, per penduduk, dibanding Bayu-Undan pada puncak produksinya. Bahkan dengan Greater Sunrise dan ladang-ladang lain, Timor-Leste tidak akan menghasilkan bahkan seperempat per penduduknya setiap tahunnya seperti negara-negara tersebut.

Kebanyakan negara-negara yang tergantung pada minyak menderita kutukan sumber alam, dimana rakyatnya miskin dan uang minyak tidak memperbaiki kehidupan mereka. Negara-negara ini termasuk: Angola, Nigeria, Republik Kongo (Brazzaville), dan Gabon. Negara-negara ini

semuanya adalah negara terendah ketiga pada HDI, seperti Timor-Leste sekarang. Produksi minyak Gabon sebelumnya sangat lebih tinggi, namun cadangannya sekarang menurun.

Oman merupakan satu-satunya negara yang mengeksport hampir semua minyaknya yang belum disuling dan tergolong rata-rata pada HDI. Negara pengeksport minyak lain – Libya dan Arab Saudi – juga mendekati menengah pada skala HDI, tetapi minyak dan gas yang tidak diproses tidak lagi dominan dalam perekonomian mereka. Satu negara yang baru tergantung minyak, Guinea Khatulistiwa, menghasilkan minyak sebanyak Norwegia, tetapi karena korupsi yang luas menyebabkan HDI-nya rendah, dalam kategori “terkutuk.”

Jalan yang berbahaya menunggu di depan

Timor-Leste tidak akan bisa menjadi Brunei atau Norwegia kedua – kita tidak memiliki minyak sebanyak mereka itu. Tetapi diperlukan upaya yang luar biasa untuk menghindari nasib Angola atau Gabon.

Ketergantungan pada minyak sangat berbahaya karena beberapa alasan:

1. Harga jual minyak dan gas di seluruh dunia berubah-ubah secara sangat liar, sehingga sulit untuk memprediksi atau tergantung pada pendapatan. Banyak negara yang

tergantung pada minyak memulai membangun proyek-proyek yang mahal ketika harga minyak tinggi, dan kemudian harus meminjam dan melanjutkannya ketika harga minyak menurun.

2. Minyak itu terbatas – minyak Timor-Leste akan habis dalam dua generasi. Kita akan ditinggali dengan pengharapan yang terlalu melambung tinggi dan kemungkinan kehancuran lingkungan hidup. Kita tidak memiliki sumber pendapatan lain yang sebanding yang bisa mengganti uang minyak dan gas.
3. Jumlah besar uang yang terlibat, dan industri minyak yang digerakkan untuk menghasilkan keuntungan, rentan terhadap korupsi dan pencurian. Milyaran uang yang dipertaruhkan bisa menggiurkan lembaga-lembaga dan individu-individu internasional maupun lokal untuk menggunakan sogokan, kolusi, kekerasan atau kekuatan militer
4. Pengembangan minyak dan gas menghasilkan sangat sedikit lapangan kerja dibandingkan dengan pertanian atau industri lain, sehingga tidak banyak uang upah yang memasuki perekonomian lokal. Hampir semua pekerjaan bergaji tinggi diisi oleh pakar asing.
5. Untuk memperoleh pendapatan minyak hanya diperlukan sedikit upaya dari pemerintah atau masyarakat, hal ini sering menyebabkan sektor-sektor lain perekonomian diabaikan.
6. Timor-Leste akan bergantung pada pendapatan minyak hanya dari satu atau dua proyek dan pada perusahaan-perusahaan asing, yang menambah besar kerentanan kita.

Pendapatan minyak dan gas Timor-Leste akan dikelola Dana Perminyakan, yang bisa mengurangi risiko dua yang pertama dari permasalahan ini, karena sebagian uang minyak dan gas akan diinvestasikan untuk generasi mendatang. Tetapi jika dana itu dikelola secara salah, diselewengkan atau dicuri, dan jika sektor-sektor lain perekonomian negara ini tidak berkembang, rakyat Timor-Leste akan menghadapi kemiskinan permanen. Lebih jauh, tidak ada satu negara yang sama seperti Timor-Leste dimana Dana Perminyakan membantu menghindari kutukan sumber alam. Ini adalah suatu eksperimen, yang hasilnya belum diketahui.

Selama sosialisasi Dana Perminyakan, banyak rakyat, terutama yang ada di distrik hanya memperoleh sedikit informasi. Rakyat khawatir mengenai bagaimana Dana Perminyakan dikelola, khawatir mengenai berlanjutnya pola kerahasiaan, korupsi dan keputusan yang sewenang-wenang

yang tegak sejak pendudukan Indonesia. Negara-negara penghasil minyak lain memiliki pengalaman yang buruk dengan perencanaan yang jelek, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dapat terulang di Timor-Leste.

Penduduk negeri kita diperkirakan bertambah dua kali lipat pada 20 tahun mendatang, membuat biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintah lainnya meningkat. Kebijakan pemerintah untuk mengelola Dana Perminyakan akan mengambil jumlah yang sama untuk dikeluarkan setiap tahunnya, dan tidak mempertimbangkan pertumbuhan penduduk.

Untuk masa depan perekonomian dan pemerintah Timor-Leste akan didominasi dan tergantung pada pendapatan minyak. Akan sangat sulit untuk mengelola situasi ini untuk keuntungan jangka panjang rakyat Timor-Leste, dan belum ada contoh baik yang bisa ditiru. Jika Timor-Leste mau mengatasi kemungkinan yang dekat itu, diperlukan perjuangan yang sabar, terfokus, dan teguh seperti perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Timor-Leste. ❖

Catatan

1. Proyeksi pendapatan minyak dalam artikel ini didasarkan pada New York Mercantile Exchange (NYMEX). Pada akhir September 2005, NYMEX memperkirakan harga minyak mentah tetap di atas \$60/barel sampai tahun 2001 atau lebih. NYMEX adalah pasar komersial dimana para spekulator memperjudikan harga minyak untuk beberapa tahun mendatang. Harga berdasarkan pada taruhan investor, bukannya pada analisis sejarah atau ilmiah. Pemerintah RDRTL juga menggunakan harga NYMEX untuk proyeksi, meskipun mereka menurunkannya sebesar \$5 untuk bersikap konservatif. Kami tidak melakukan penurunan itu, agar lebih realistis.
2. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP – United Nations Development Program) menghitung Indeks Pembangunan Manusia (HDI) untuk setiap Negara, membuat peringkat dari 1 (terbaik) sampai 177. Indeks ini mengukur tiga dimensi dasar kemajuan manusia: kehidupan yang panjang dan sehat (harapan hidup pada waktu lahir), pengetahuan (kemampuan baca-tulis orang dewasa dan mengikuti pendidikan sekolah), dan standar kehidupan (GDP per kapita dalam daya beli). HDI UNDP 2005 diambil dari data untuk tahun 2003.
3. Sumber untuk grafik: Pendudukan dan GDP dari CIA World Factbook 2005 (data untuk 2004).
Produksi dan ekspor minyak dari British Petroleum World Energy Review, 2005 (data untuk tahun 2004).
Indeks Pembangunan Manusia dari UNDP Human Development Report, 2005 (lihat catatan 2).
Data tentang minyak dan ekonomi yang diproyeksikan untuk tahun 2010 diambil dari data Pemerintah RDRTL dan IMF; proyeksi penduduk dari UN World Development Report, 2004.

Dengarkan Program Radio “I gualidade” La’o Hamutuk

Wawancara dan komentar mengenai isu-isu penting yang kami pantau!
Setiap Minggu pada jam 1:00 siang di Radio Timor Leste

Timor-Leste Membuat Sistem Perundang-undangan Minyak Penuh Lubang Kelemahan

Di bulan Juli, Pemerintah dan Parlemen Timor-Leste mengesahkan beberapa perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang mengatur bagaimana pembangunan minyak dan gas akan dilaksanakan di negeri ini. Kesemuanya, perundang-undangan itu dinamakan “sistem perundang-undangan minyak,” dan perundang-undangan itu menunjukkan hubungan antara Timor-Leste dan perusahaan minyak yang akan melakukan penyulingan minyak dan gas kita dan kemudian menjualnya.

Sistem ini sangat penting bagi masa depan bangsa kita – untuk memastikan bahwa rakyat kita menerima pembagian uang yang adil dari penjualan sumber daya kita (lihat Ketergantungan pada Minyak di halaman pertama) dan melindungi hak asasi, lingkungan, dan masyarakat kita dari kesalahan-kesalahan, kecerobohan atau ketamakan yang mungkin dilakukan oleh para perusahaan minyak asing atau para pejabat publik kita.

Pasal 139 Konstitusi Timor-Leste menyatakan bahwa sumber daya alam di bawah laut dan bawah tanah milik

Negara Timor-Leste, bukan milik Pemerintah pada periode waktu tertentu. Pemerintah kita sekarang ini tidak akan selamanya berkuasa, dan Timor-Leste perlu untuk melindungi dirinya sendiri dari penyalahgunaan karena keinginan yang salah, lembaga-lembaga yang korup, dan penyalahgunaan karena orang-orang tertentu yang akan diuntungkan oleh puluhan milyar dolar dari sumber-sumber daya alam kita.

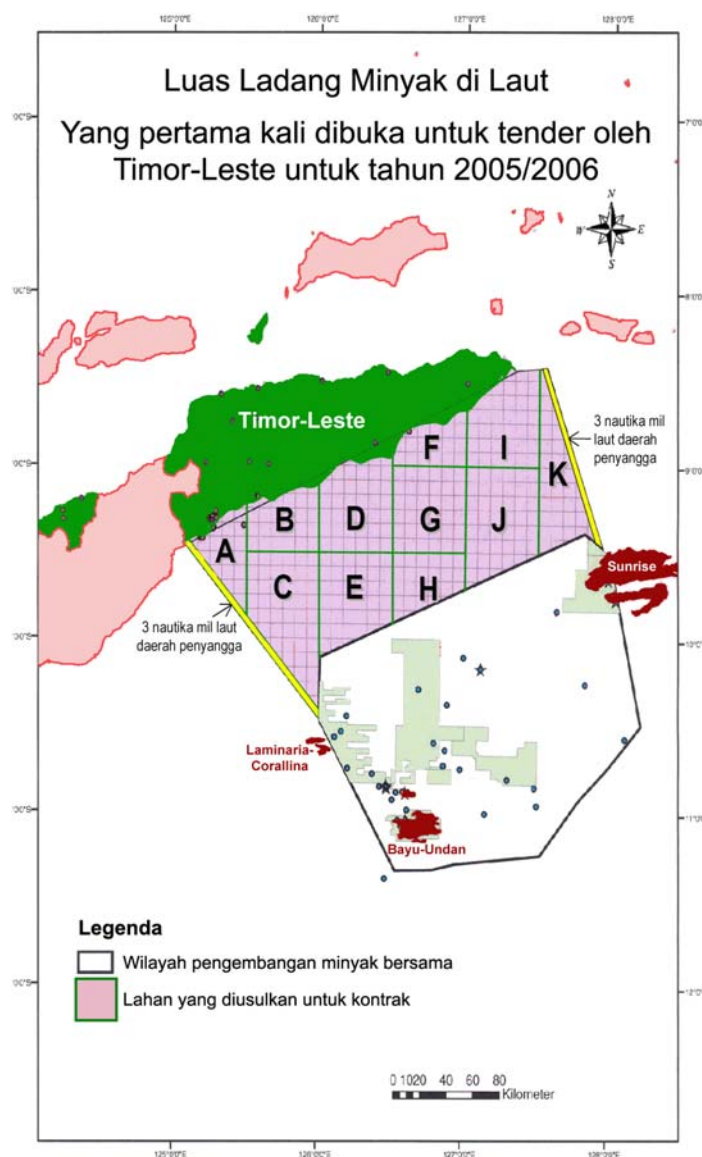
Sebenarnya ada dua sistem perundang-undangan: satu untuk wilayah daratan dan perairan Timor-Leste, dan satunya untuk Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) yang ditentukan Perjanjian Laut Timor tahun 2002 antara Timor-Leste dan Australia, seperti yang ditunjukkan peta di halaman ini. Masing-masing sistem perundang-undangan termasuk Undang-Undang (UU) Minyak dan Kontrak Pembagian Produksi (PSC) yang akan ditandatangani oleh masing-masing perusahaan dan Pemerintah kita.

Sistem perundang-undangan RDTL juga memasukkan Hukum Perpajakan yang mendefinisikan bagaimana uang dari penjualan minyak Timor-Leste akan dibagi antara perusahaan dan Pemerintah Timor-Leste. Tak satu pun perundang-undangan ini berlaku bagi proyek-proyek yang telah berjalan, seperti Bayu-Undan dan Elang-Kakatua. Jika ladang minyak Greater Sunrise diolah oleh perusahaan Woodside menurut kontrak yang ditandatangani di tahun 2002, sistem perundang-undangan minyak baru tidak akan berlaku bagi kedua ladang minyak tersebut, tetapi jika perusahaan lain memulai proyek baru, (tidak ada rencana pengolahan telah disetujui) mereka akan tunduk pada sistem perundang-undangan baru.

Baru-baru ini Timor-Leste juga memberlakukan sebuah Undang-Undang Dana Minyak, yang menjelaskan bagaimana pemerintah akan mengelola pendapatan yang diterima dari minyak. Artikel ini tidak mendiskusikan Undang-Undang Dana Minyak, yang menjelaskan apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah kita. Kita akan fokus pada “sistem” yang berlaku bagi para perusahaan yang datang ke sini untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam kita.

Selama 2004, Pemerintah Timor-Leste bekerja dengan para penasihat internasional untuk menulis rancangan sistem perundang-undangan minyak, dan kemudian mengadakan tiga hari konsultasi publik. Mereka juga meminta komentar-komentar tertulis, dan menerima submisi dari tiga organisasi non pemerintah lokal dan satu organisasi non pemerintah internasional, tiga perusahaan minyak, Presiden Xanana Gusmão, dan Bank Dunia. *La'o Hamutuk* mengajukan analisa lengkap hampir 100 halaman.

Rancangan undang-undang yang diajukan diubah sedikit, disetujui oleh Dewan Menteri bulan Desember 2004 dan Parlemen pada bulan Juli 2005. Undang-undang tersebut diumumkan oleh Presiden dan sekarang berlaku. Pemerintah Timor-Leste menyebarluaskan wilayah lepas pantai untuk dieksplorasi oleh para perusahaan minyak internasional, label A-K di peta sebelah kiri. Lelang akan diterima awal tahun 2006, dengan penandatanganan kontrak di pertengahan tahun. Lelang keliling ini dilakukan secara bersama oleh Otoritas Rancangan Laut Timor (untuk wilayah tak berijin di dalam Wilayah Pengembangan Minyak Bersama) dan oleh Direktorat Minyak, Gas dan Energi (OGED) Pemerintah Timor-Leste.



Peta ini menunjukkan wilayah (A-K) di wilayah perairan yang belum terselesaikan yang sedang ditawarkan kepada para perusahaan minyak untuk dieksplorasi. Diagram ini dan lainnya dalam artikel ini diadopsi dari *La'o Hamutuk* dari presentasi Pemerintah RDTL kepada para perusahaan minyak.

Struktur Management untuk Sektor Perminyakan Timor - Leste



Bank Dunia merayakan sistem perundangan-undangan minyak Timor-Leste sebagai sebuah “kerangka kerja seni negara” yang “oleh semua pengamat sebagai salah satu sistem manajemen minyak terbaik.” *La’o Hamutuk* telah menemukan bahwa sistem perundang-undangan minyak diisi dengan lubang meloloskan diri yang berbahaya, kelalaian, konflik kepentingan dan masalah-masalah penting lainnya. Jika Bank Dunia benar maka sistem ini “dipertimbangkan sebagai model untuk diperhatikan,” yang hanya menunjukkan seberapa sulit bagi negara-negara lain untuk mengelola pembangunan minyak demi manfaat bagi warga negara mereka.

Selama proses di Parlemen, *La’o Hamutuk* dan lainnya mengidentifikasi sejumlah isu-isu penting di perundang-undangan yang mempunyai masalah-masalah utama. Meskipun perbaikan-perbaikan kecil dilakukan, masih banyak cacatnya.

Undang-undang Minyak RDTL dan Model Kontrak PSC terdiri dari 960 klausula. Hanya 16% dari 243 perubahan yang dianjurkan oleh organisasi non pemerintah dan Bank Dunia secara penuh atau per-bagian menuliskannya di dalam undang-undang, 84% ditolak. Anjuran-anjuran dari para perusahaan minyak lebih diterima; perubahan di dalam struktur pajak dapat memberikan pemasukan bersih ratusan juta dolar kepada mereka.

Perubahan positif hanyalah menambah pilihan pembentukan sebuah perusahaan minyak nasional (milik pemerintah) yang dapat memiliki 20% proyek minyak juga gas di Timor-Leste (Pasal 22 UU Minyak)

Tidak seperti perusahaan minyak nasional, perusahaan minyak swasta (komersial) bisa berdiri hanya untuk mendapatkan uang bagi para penanam modal. Dari pandangan para pemegang saham, jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah satu-satunya tujuan, dan manajemen perusahaan harus memaksimalkan keuntungan, yang seringkali berarti memotong kesempatan atau menimbulkan resiko-resiko bagi lainnya. Para perusahaan minyak internasional adalah lembaga dengan modal besar yang membuat keuntungan besar, dan Timor-Leste adalah bagian kecil dari kerja mereka. Contohnya, ladang minyak yang digarap Conoco-Phillips di seluruh dunia 13 kali lipat lebih besar dari saham mereka di Bayu-Undan.

Perusahaan akan mempertimbangkan faktor-faktor lain pada saat perundang-undangan dan kontrak-kontrak dari Pemerintah Timor-Leste mensyaratkannya. Jika kita ingin para perusahaan melindungi kepentingan ekonomi kita, tidak merusak lingkungan hidup kita, menghormati masyarakat lokal, menginformasikan kepada kita mengenai apa yang mereka rencanakan, mendengarkan harapan kita, melindungi sumber-sumber daya alam kita, mempekerjakan masyarakat Timor-Leste, atau secara sederhana tidak membahayakan hidup kita, kita perlu menuliskannya ke dalam sistem perundang-undangan.

Perundangan-undangan dirancang oleh para penasihat internasional yang berpengalaman di dalam industri minyak atau mengelolanya. Akan tetapi, konsekuensi bagi kebanyakan rakyat di negara-negara sedang berkembang dari industri ini secara keseluruhan adalah buruk. Ini akan meminta pendekatan-pendekatan baru dan perlakuan luar biasa untuk mencegah Timor-Leste menderita dari “bencana akibat sumber daya alamnya” yang menyebabkan semua negara-

negara tergantung pada minyak yang sebenarnya miskin sebelum mereka mengolah minyak dari wilayah mereka.

Transparansi

Transparansi adalah syarat penting untuk memastikan bahwa pembangunan minyak menguntungkan rakyat Timor-Leste, daripada memberikan uang bagi sejumlah politisi tak bermoral atau para perusahaan minyak. Jika pembangunan minyak dan gas untuk membantu rakyat kita, rakyat harus mendapatkan akses penuh untuk mendapatkan informasi.

Sistem perundang-undangan yang baik akan bermula dari anggapan mengenai transparansi, dan bisa membuat daftar pengecualian khusus dan sempit untuk melindungi secara teknis kerahasiaan perusahaan. Sistem perundang-undangan minyak justru berlawanan – mewajibkan penyebaran sedikit informasi, dan melarang penyebaran informasi lainnya kepada masyarakat umum.

Rancangan undang-undang mempunyai Daftar Publik sejumlah dokumen yang tersedia bagi masyarakat umum, tetapi undang-undang resminya mengubahnya. Undang-undang hanya mensyaratkan Kementerian Perminyakan untuk membuat “ringkasan lengkap” beberapa dokumen penting, termasuk Rencana Pembangunan yang disetujui (UU Minyak, Pasal 30.1(b)). Ringkasan terbuka untuk penyensoran, dan tidak ada jaminan akan tersedia informasi yang lengkap atau akurat.

Ini menguatirkan. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak secara langsung pada rakyat Timor-Leste, seperti penilaian dampak lingkungan, rencana kesehatan dan keselamatan, laporan kecelakaan dan resiko, dan rencana penghentian tidak akan terbuka kepada umum.

Meskipun Perdana Menteri Timor-Leste mengatakan pemerintahnya berpijak pada Inisiatif Transparansi Industri Bahan Baku (EITI), UU Minyak menghindarkan para perusahaan dari transparansi secara sukarela (Model PSC 15.2(e), 15.6(b)). EITI mendorong para perusahaan untuk mengeluarkan informasi mengenai operasional minyak mereka, khususnya pembayaran-pembayaran kepada pemerintah. Menurut UU Timor-Leste, para perusahaan tidak dapat memberikan informasi kepada publik tanpa izin dari Pemerintah. Faktanya, Pemerintah sendiri dilarang memberikan informasi kecuali yang ditentukan oleh UU secara khusus (Model PSC 15.6(a)).

Pertanggungjawaban Perusahaan

Kesepakatan internasional yang mendesak mengakui bahwa para perusahaan trans-nasional secara rutin melanggar keadilan ekonomi, lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Para pemerintah dan lembaga internasional telah mengembangkan perjanjian-perjanjian dan jaringan kerja internasional untuk mengatasi masalah ini. Sebagai negara baru dengan perundang-undangan yang baru, kita harus belajar dari pengalaman negara-negara lain dan mengambil keuntungan dari kerja baik mereka.

UU Minyak Timor-Leste melarang para perusahaan dengan “sebuah data yang tidak memenuhi prinsip-prinsip kerja sama antar kewarganegaraan yang baik” dari pelaksanaan kerja-kerja perminyakan di Timor-Leste (Pasal 10.2(b)). Meskipun ini merupakan ide yang baik, tidak dapat dilaksanakan tanpa definisi “kerja sama antar kewarganegaraan.” Kami berharap pelaksanaan peraturan-peraturan ini akan lebih khusus, sehingga sebagai contoh para perusahaan yang terlibat dalam kerja paksa di Burma, penghancuran masyarakat lokal di Nigeria, penipuan laporan-laporan keuangan di Alaska, atau pemusnahan lingkungan hidup di Ekuador tidak akan diijinkan beroperasi di Timor-Leste.

Di banyak negara, fasilitas minyak di daratan mempunyai hubungan yang tidak bersahabat dengan masyarakat lokal. Para kontraktor melindungi investasi mereka dengan menggunakan barikade kawat berduri dan mempekerjakan para penjaga keamanan bersenjata, dan kadang-kadang mempekerjakan polisi lokal dan para pejabat militer, seringkali mengarah pada kerusuhan dengan kekerasan, luka-luka atau bahkan pembunuhan. Sayangnya, UU Timor-Leste tidak mengatur persoalan ini, dan tidak mendorong atau mendesak para perusahaan untuk melindungi hak asasi manusia. *La’o Hamutuk* kecewa karena sistem perundang-undangan Timor-Leste tidak memasukkan “Prinsip-prinsip Sukarela terhadap Keamanan dan HAM” yang disahkan pada tahun 2000 oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris dan disetujui oleh beberapa perusahaan minyak, termasuk ConocoPhillips dan Shell.

Rancangan UU Minyak disebarluaskan untuk konsultasi publik mensyaratkan para perusahaan untuk memastikan bahwa para pekerja mereka tunduk pada UU ini, dan para manajer bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi atas ijin mereka, kerja sama secara diam-diam atau karena pengabaian. Sayangnya, pasal ini dihapus dari UU yang disahkan.

Denda menurut UU Minyak sangat rendah membuat para perusahaan tunduk pada hukum. Bahkan “kejahatan” yang membahayakan hidup seseorang” atau “sangat membahayakan lingkungan hidup,” sebagai pelanggaran yang paling serius hanya didenda sebesar dua juta dolar (Pasal 41.1). Denda ini senilai dengan produksi kurang dari lima jam di Bayu-Undan.

Demokrasi

Sistem perundang-undangan Timor-Leste sangat baik hati kepada industri, memberikan proses pengesahan dan pengaturan secara mudah dan terpusat melalui satu kementerian dan hampir tidak ada pembatasan mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan di Timor-Leste. Akan tetapi, UU negara-negara lain terdekat, termasuk UU Minyak Indonesia 2001, memasukkan pengecekan dan pengawasan dalam proses pengesahan dan penyelesaian perselisihan.

Ketentuan-ketentuan yang sama di UU Timor-Leste dapat membantu memastikan penegakan perlindungan sesuai UU.

Sistem perundang-undangan minyak menempatkan berkali-kali kekuasaan pada Kementerian Perminyakan, tanpa kelalaian atau partisipasi dari kementerian lain. Penugasan kementerian ini untuk melaksanakan proyek-proyek minyak dengan cepat dan menguntungkan. Tetapi menurut UU Minyak, kementerian yang sama bertanggung jawab untuk mengesahkan proposal-proposal mengarah pada lingkungan hidup, penghentian, pembersihan, dan perlindungan yang rendah terhadap HAM. Ini menimbulkan konflik kepentingan, karena Kementerian akan menjadi enggan untuk melambankan pembangunan minyak, dan perlindungan terhadap bangsa kita akan mendapatkan prioritas yang lebih rendah. Kementerian mengevaluasi dan mengesahkan kontrak-kontrak dengan para perusahaan minyak, mengawasi para perusahaan, dan juga bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan. Kebanyakan keputusannya tidak dapat ditinjau kembali oleh atau naik banding ke lembaga-lembaga lain, dan bahkan banyak yang tidak disyaratkan terbuka untuk umum.

Salah satu cacat yang paling berbahaya di UU Minyak adalah ijin yang ada di tangan Pemerintah untuk menandatangani kontrak-kontrak dengan para perusahaan tanpa proses undangan lelang kepada publik dan lelang terbuka secara umum (Pasal 13.1(b)). Meskipun para pejabat mengatakan ijin ini hanya berlaku untuk proyek-proyek kecil, namun dalam prakteknya tidak ada pembatasan. Hal ini memberikan kesempatan untuk korupsi, kolusi dan nepotisme, dan ketentuan-ketentuan transparansi yang terbatas di dalam UU tidak cukup melindungi hak-hak Timor-Leste.

Bagian lain yang berbahaya adalah memberikan kekuasaan kepada Kementerian Minyak untuk mengizinkan sebuah perusahaan melanggar kontrak (Pasal 21). Karena tindakan Menteri seperti ini tidak diumumkan secara luas dan tidak dapat diajukan ke tingkat banding, hal ini mengundang korupsi. Jika penegakan hukum berlaku di demokrasi kita, pemegang wewenang tidak akan mengizinkan orang-orang melanggar hukum dan kontrak dengan kekebalan hukum.

Di negara-negara lain, para perusahaan minyak seringkali menyuap para pejabat untuk menguntungkan perusahaan mereka. Berlusin-lusin para eksekutif perusahaan minyak di Eropa telah dipenjarakan karena korupsi di Afrika. Sepertinya sistem perundang-undangan minyak Timor-Leste dirancang untuk mengundang suap. Satu orang harus menyelesaikan kewenangannya untuk memberikan dana, mempercepat proyek-proyek, dan mengizinkan para perusahaan melanggar hukum dan kontrak. Sebuah perusahaan yang rakus selalu mencegah pertanggungjawaban hukum membayar hanya satu orang. (*La’o Hamutuk* tidak meyakini bahwa Perdana Menteri Timor-Leste, Mari Alkatiri, telah atau akan menerima uang suap. Apa yang kami katakan adalah UU ini mempermudah siapapun yang berwenang untuk melakukannya dan melakukan apapun yang perusahaan inginkan).

Timor-Leste belum mengembangkan mekanisme yang kuat untuk konsultasi publik, menghimpun masukan dari masyarakat dan pandangan publik. Kita telah mewarisi kerahasiaan, proses sentralistik dari Portugal, Indonesia, dan UNTAET. Sistem perundang-undangan minyak ini melanjutkan pola-pola itu.

Pertemuan publik harus diadakan untuk keputusan-keputusan pokok yang memberikan dampak kepada masyarakat lokal, memberikan kesempatan bagi masyarakat

yang kebanyakan terkena dampak secara langsung untuk didengarkan. Sebaliknya, UU mengizinkan Kementerian Minyak untuk “memberikan kesempatan kepada orang-orang yang diperkirakan terkena dampak (proyek-proyek minyak) untuk membuat perwakilan, dan akan memberikan pertimbangan kepada perwakilan yang sesuai menerima perwakilan orang-orang itu.” (Pasal 6.2) Karena Kementerian diberikan mandat untuk membangun industri minyak, para perwakilannya yang menyarankan bahwa sebuah proyek akan dikerjakan lebih hati-hati atau bisa saja sama sekali “tidak relevan” dan seperti yang akan diabaikan.

Keterlibatan Masyarakat Lokal

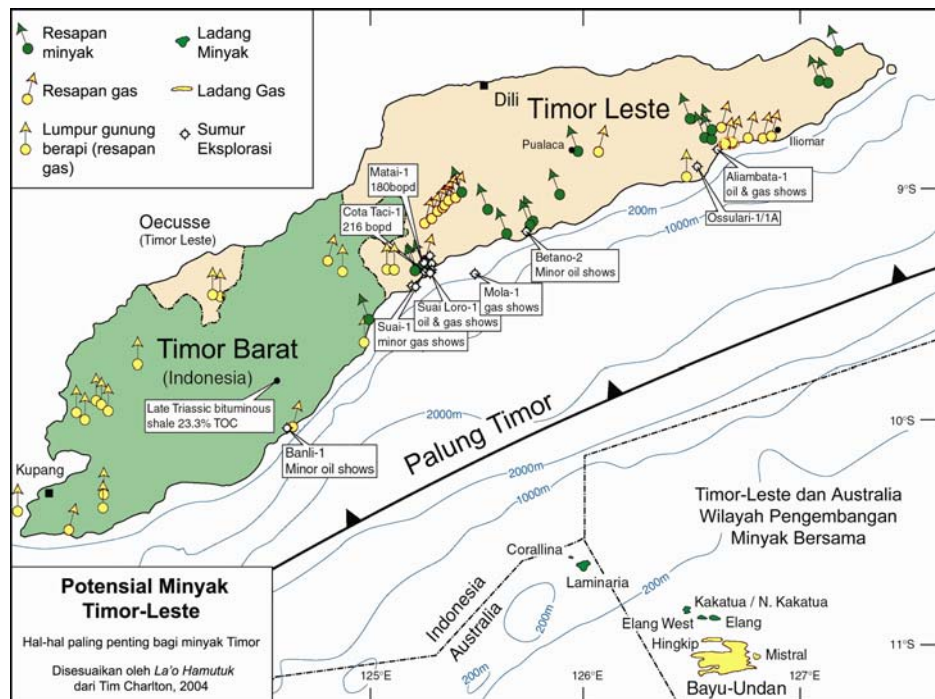
Saat ini pembangunan minyak Timor-Leste berlangsung di laut, di luar pandangan dan jauh dari perumahan dan ladang pertanian. Kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan ini akan berubah, sama halnya dengan pabrik-pabrik pemrosesan dan fasilitas-fasilitas minyak lainnya akan dibangun di daratan. Peta di halaman ini menunjukkan lokasi-lokasi yang memungkinkan, sebagai tambahan untuk pabrik pencairan gas di pantai selatan.

Fasilitas-fasilitas perminyakan di negara-negara lain seringkali mempunyai hubungan yang bermusuhan dengan para tetangga mereka, menghasilkan konflik, militerisasi, penghancuran lingkungan hidup dan pelanggaran HAM. Di wilayah kita sendiri, perang yang berkepanjangan di Aceh, Papua Barat dan Bougainville telah menyebabkan masyarakat merasa bahwa pembangunan yang diputuskan tanpa ganti rugi dan konsultasi yang pantas. Fasilitas perminyakan menjadi puncak tindak represif.

Jalan terbaik untuk mencegah situasi yang tidak bisa diterima ini adalah masing-masing masyarakat merasa aman dengan proyek-proyek di sekitar mereka, dan merasa memiliki dan bangga dengan semua proyek. Perusahaan, pemerintah dan masyarakat harus bertanggung jawab bersama-sama bagi keputusan-keputusan yang berdampak kepada mereka. Tanggung jawab bersama ini harus diinformasikan seluruhnya pada awal proyek, demikian juga mengenai pembagian keuntungan. Ini berhubungan dengan fasilitas dan hak-hak untuk mengakses fasilitas yang dekat dengan tempat tinggal mereka atau wilayah-wilayah yang kemungkinan besar terkena dampak.

Manfaat untuk masyarakat dapat berupa pembayaran tunai atau pelayanan dari pemerintah nasional (seperti sekolah atau klinik kesehatan), atau membantu pembangunan ekonomi masyarakat. Juga adanya tambahan lapangan pekerjaan dari proyek-proyek bangunan dan operasionalnya, perhatian harus diberikan kepada pembangunan lain yang terus dapat memperluas lapangan pekerjaan setelah proyek minyak selesai. Di banyak negara yang dikacaukan oleh pendapatan minyak, kebijakan-kebijakan pemerintah telah mengabaikan sektor-sektor lain seperti pertanian, energi yang bisa diperbaharui atau perikanan. Kami mendesak Timor-Leste untuk tidak membuat kesalahan di tingkat lokal atau nasional.

Masyarakat dan hak asasi manusia orang-orang yang terkena dampak operasional industri minyak tidak tercantum



di dalam sistem perundang-undangan Timor-Leste. Hak-hak ini, sama halnya dengan sensitif terhadap lingkungan, tanah yang keramat dan tanah adat dilindungi oleh bangsa-bangsa lain. UU Minyak Indonesia misalnya mensyaratkan persetujuan masyarakat lokal yang mengizinkan mereka yang diperkirakan terkena dampak proyek-proyek minyak untuk berbagi dalam pengambilan keputusan.

Sosialisasi dan ijin harus melibatkan pemilik tanah swasta dan masyarakat umum, juga para pemimpin lokal, per-sektor dan pemerintah, sebagai satu komunitas. Sesungguhnya ijin lebih dahulu diinformasikan melalui pendidikan bagi masyarakat umum secara luas dan sosialisasi mengenai akibat-akibat yang mungkin terjadi dan pilihan-pilihan, khususnya bagi masyarakat yang belum memahami, dengan menggunakan foto sungai yang tercemar, saluran pipa yang bocor, tumpahan minyak dari kapal tanker, kebakaran di ladang minyak atau ledakan gas.

Pemerintah lokal dan nasional harus terlibat untuk memastikan hak-hak pemilik tanah dan masyarakat dihormati, karena negara bertanggung jawab melindungi rakyat dan masyarakat lokal. Untuk memastikan hal ini, tugas ini seharusnya tidak ditugaskan kepada Kementerian Minyak, tetapi cabang pemerintah nasional lainnya yang tidak diarahkan untuk mempromosikan pembangunan minyak ke kerusakan hak-hak dan gaya hidup lokal yang mungkin terjadi.

Rancangan UU Minyak disebarluaskan untuk konsultasi publik sehingga memungkinkan para pemilik tanah swasta bisa menolak fasilitas-fasilitas minyak di tanah mereka. Dalam UU yang telah disahkan, pemilik tanah tidak mempunyai pilihan; dia harus mengabdikan semua hasrat para perusahaan minyak dengan menerima “ganti rugi yang adil dan masuk akal” yang diputuskan oleh Kementerian Minyak. (Pasal 17.1(a)(iii))

Di banyak tempat di seluruh dunia, pemindahan pemukiman telah menyengsarakan mereka yang terlibat, lebih buruk sekali dari keuntungan apapun yang diberikan oleh proyek. Jika pembangunan minyak akan memindahkan masyarakat dari rumah, wilayah pertanian dan perairan mereka, sebuah pandangan internasional yang sifatnya

mendesak menyatakan bahwa mereka yang dipindahkan harus berkehidupan lebih baik setelah pemindahan, dan pemindahan tersebut tidak berlaku bagi tanah yang dikeramatkan. Orang-orang yang dikatakan akan dipindah harus berhak menolak atau menerima keputusan, dan untuk memutuskan kemana mereka akan dipindahkan. Sistem perundang-undangan Timor-Leste tidak memberikan pengamanan, perlindungan atau syarat-syarat ganti rugi.

Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup

Menyedihkan, semua orang di seluruh dunia telah melihat pembangunan minyak menimbulkan kerusakan pada lingkungan alam, tidak hanya menghancurkan habitat, suka margasatwa, hutan dan air, tetapi juga menyebabkan kelaparan dan sakit, karena orang-orang tidak mampu berladang atau mendapatkan ikan dari sungai dan laut mereka. Banyak yang telah diracuni oleh bahan-bahan kimia atau minyak, atau terbakar karena api dan ledakan; banyak diantaranya telah dipaksa meninggalkan rumah dan tanah mereka dimana keluarga mereka telah tinggal dari generasi ke generasi. Habitat khusus, spesies yang hampir punah dan cagar alam seringkali dihancurkan.

Keselamatan dan lingkungan hidup tidak disebut di dalam bagian Pembukaan UU Minyak Timor-Leste, dan perlindungan yang diberikan kepada mereka sangat terbatas. Para perusahaan yang mengajukan kontrak telah memasukkan ide-ide dalam proposal “mengamankan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan semua orang yang terlibat atau terkena dampak kerja-kerja perminyakan” dan “melindungi lingkungan hidup, mencegah, meminimalkan dan mengurangi polusi, dan kerusakan lingkungan hidup lain dari kerja-kerja perminyakan” (Pasal 13.3(a)). Tidak ada syarat bahwa proposal-proposal itu akan dievaluasi, terbuka untuk umum atau bahkan dilaksanakan, dan tidak ada peninjauan ulang oleh seseorang di luar Kementerian Perminyakan.

Sistem perundang-undangan Timor-Leste mensyaratkan para perusahaan untuk melaksanakan “Praktek Perminyakan yang Baik,” yang didefinisikan sebagai “praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang berlaku di industri perminyakan di seluruh dunia oleh para pelaku yang bijaksana dan rajin” dalam situasi yang sama, dengan tujuan melindungi sumber daya minyak, perlindungan keamanan dan lingkungan alam (Pasal 23.1). Data industri di seluruh dunia tidak baik –UU kita harusnya mensyaratkan praktek-praktek yang terbaik, bukan yang rata-rata saja. Selanjutnya, syarat ini juga kabur untuk ditegakkan. Syarat-syarat ini harus dibuat khusus dalam peraturan. Model PSC mensyaratkan para perusahaan untuk mengurangi resiko-resiko serendah mungkin terhadap keselamatan dan lingkungan hidup dalam kerja-kerja yang beralasan” (PSC 5.3(a)), tetapi tidaklah cukup baik ketika hidup dipertaruhkan, dan seharusnya syarat-syarat ini dipraktekkan sesuai standar khusus internasional atau paling tidak “sama rendahnya dengan pencapaian yang beralasan.”

Sebuah sistem perundang-undangan yang melindungi Timor-Leste akan mensyaratkan sebuah Penilaian Dampak Lingkungan akan dilakukan sebelum memulai proyek perminyakan. Penilaian ini dibuat terbuka untuk umum, dan masyarakat akan diberikan kesempatan untuk memberikan informasi tambahan dan menyatakan keprihatinan mereka. Sebuah badan independen (terpisah dari badan-badan yang bertanggung jawab atas perminyakan, pembangunan

ekonomi, atau industri) akan mengevaluasi hasil penilaian, komentar dari publik dan memutuskan jika proyek yang diusulkan akan merusak dan beresiko, atau jika langkah-langkah tambahan dibutuhkan untuk menjaga lingkungan. Jika perusahaan, Kementerian atau masyarakat sipil merasa keputusan tersebut tidak benar, mereka akan naik banding ke sistem peradilan.

Sebuah proses Penilaian Dampak Lingkungan dan peninjauan ulang harus diadakan sebelum pengesahan sebuah rencana bagi penonaktifan untuk memastikan bahwa setelah proyek selesai, lingkungan dan tanah akan dikembalikan pada kondisi yang aman dan semoga bisa dipergunakan lagi.

Sayangnya, sistem perundang-undangan Timor-Leste tidak mensyaratkan proses-proses semacam ini. Kita harus percaya Menteri Perminyakan untuk membuat keputusan yang benar, meskipun prioritas-prioritas dia lain dan kita tidak akan tahu apa yang telah diajukan oleh para perusahaan, atau apakah mereka akan melakukan janji-janji mereka.

Kesimpulan

Pada tahun 2006, rencana-rencana Timor-Leste masih mengutamakan pembangunan minyak lepas pantai, dimana beberapa keprihatinan yang ada sedikit menguatirkan. Beberapa proyek minyak di daratan dalam skala kecil dapat dimulai segera, dan eksplorasi yang lebih besar hanya dapat berlangsung setahun. Tahun depan, Pemerintah akan mengembangkan peraturan-peraturan dan mekanisme-mekanisme untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sistem perundang-undangan yang tidak mencukupi dengan serius. Kami berharap mereka akan lebih baik, tetapi kami pesimis.

Proyek-proyek minyak besar membutuhkan bertahun-tahun untuk membangun, melibatkan komitmen dua atau tiga generasi. Kontrak dan rencana pembangunan disahkan pada awal proyek akan berlaku selama dasawarsa, bahkan jika kemudian Timor-Leste memperbaiki UU minyak. Setelah sebuah proyek dimulai, sangatlah sulit untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian. Sekali lingkungan hidup atau masyarakat hancur, mereka tidak dapat diciptakan lagi.

Tetapi meskipun pembangunan minyak merupakan tahapan sementara dari sejarah Timor-Leste, dan cadangan minyak dan gas yang kita ketahui akan dihabiskan seumur hidup oleh banyak orang yang hidup hari ini. Sebagai tambahan untuk melindungi diri kita sendiri dari korupsi atau kehancuran dari pembangunan minyak, kita harus memulai mencegah perekonomian kita tergantung pada pendapatan dari minyak.

Kami sangat mendesak Timor-Leste untuk melaksanakan sebuah proses rencana jangka panjang yang melibatkan masyarakat umum dan lainnya, mengenai bagaimana mengembangkan sektor-sektor non-minyak perekonomian Timor-Leste untuk 50 tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Nasional yang disiapkan pada tahun 2003 hanya melihat 18 tahun hingga tahun 2020 ketika persediaan minyak kita terbesar, Bayu-Undan dan Greater Sunrise, masih akan berproduksi. 30 tahun kemudian, Timor-Leste mungkin tidak mempunyai sumber minyak.

Jika kita tidak mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain, kita akan dikutuk oleh kemiskinan dan ketergantungan yang abadi pada energi dari luar. Di negara-negara kaya, para perusahaan dan pemakai minyak akan diuntungkan oleh sumber daya alam kita, tetapi rakyat Timor-Leste sebagai pemilik sebenarnya akan menderita. ❖



Staf La' o Hamutuk dan dewan berfoto bersama diakhir pertemuan rencana strategi diakhir bulan Oktober 2005.

Belakang dari kirik ke kanan: Maria Afonso de Jesus, Bella Galhos, Inês Martins, Yasinta Lujina, Guteriano Nicolau.

Didepan: Alex Grainger, anggota dewan Adérito de Jesus Soares, Santana Soares.

Siapa di La' o Hamutuk?

Staf La' o Hamutuk: Maria Afonso de Jesus, Bella Galhos, Alex Grainger, Yasinta Lujina, Inês Martins, Guteriano Nicolau, Charles Scheiner, Santana Soares

Penerjemah: Kylie, Titi Irawati, Selma Hayati

Dewan Penasehat: Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, Pamela Sexton, Adérito de Jesus Soares

Aksi Solidaritas untuk Burma

Pada 14 Oktober 2005, sejumlah organisasi non-pemerintah dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum NGO Timor-Leste (FONGTIL), Timor-Leste Coalition with Asia-Pacific (TILCAP – Koalisi Timor-Leste dengan Asia-Pasifik), dan jaringan yang berafiliasi dengan OilWatch (*La' o Hamutuk*) melakukan aksi di depan kantor Kedutaan Besar Korea Selatan di Dili. Aksi ini merupakan bagian dari hari internasional untuk rakyat Burma, menentang Proyek Gas Shwe. Sekitar 25 peserta datang untuk mengungkapkan solidaritas mereka dengan rakyat Burma dalam perjuangan mereka untuk demokrasi dan hak asasi manusia.

Proyek Gas Shwe di Burma merupakan kerjasama besar antara kediktatoran militer Burma (Myanmar), perusahaan Korea Daewoo International, Korean Gas Company, dan pemerintah Korea. Proyek ini melanggar hak asasi manusia termasuk perampasan tanah milik rakyat, dengan menggunakan pasukan bersenjata untuk memindahkan penduduk, tenaga kerja paksa, melakukan penyiksaan, pembunuhan, dan kekerasan seksual terhadap rakyat di Negara Bagian Arakan, Burma.

Atas nama para demonstran, Direktur Eksekutif Forum NGO Timor-Leste, Maria Angelina Sarmento menyampaikan sepucuk surat (yang dimuat pada halaman berikutnya buletin ini) kepada wakil Kedutaan Besar Korea (foto).

Para demonstran meminta pemerintah Korea Selatan dan Daewoo International untuk menghentikan Proyek Gas Shwe dan mengakhiri tindakan militer melanggar hak-hak rakyat Burma. ❖



Forum Solidaridade Timor-Leste ba Povu Burma

Kontakto: FONGTIL; +670-7240107, TILCAP +670-7278653

14 Outubro 2005

Sua Excellência Mr. Jin Kyu Ryoo
Embaixada Republica Korea
Avenida de Portugal, Motael, Dili, Timor-Leste

Excelentissimo senhor,

Lori Organizaçaun Non-Governmental hirak nebe asina iha okos, inklui mos membro Forum ONG Timor-Leste (Fongtil), Timor-Leste Coalition with Asia-Pasific (TILCAP) no Rede Oil Watch, ami hakerek atu espressa ami nia hanoin ba ema sira nebe hetan efeito husi Projekto Shwe Gas iha Burma.

Governo Korea, kompania gas Korea ho Korporasaun Daewoo Internasional sira hotu involve klean liu iha projekto ne'e. Ami husu imi atu uza imi nia influencia ba instituisaun forte sira ne'e atu husu sira hapara lalais sira nia partisipasaun.

Ohin, ami mos hola parte iha asaun global hasoru projekto gas liu husi participa hamutuk ho povo estado Arakan-Burma atu selebra Loron Internasional ba Asaun hasoru Projekto Shwe gas. Ami iha ne'e atu espera ami nia solidariedade ho luta ba demokrasia no direitu humanus ba ema Burma sira. Bainhira povo Timor-Leste luta hasoru okupasaun Indonesia, ema hotu iha mundo - inklui iha Korea - hamrik hodi fo solidariedade mai ami hodi tulun ami hetan liberdade ne'e.

Projekto Shwe Gas karik sei sai fonte uniko imposto husi ditadura militar nebe'e halo opresaun ba povo Burma. Liu husi partisipasaun iha projekto ne'e, Korea mos fasilita halo opresaun. Ami husu imi atu hapara imi nia involvimento nebe'e komplezo tebes iha regime brutal ne'e.

Oras ne'e dadaun projekto mina no gas iha Burma ne'e halo mos violasaun ba direitus humanus ida boot tebes, inklui hadau rai, muda comunidade ho forsa, obriga trabalhador ho forsa violensia, inklui tortura, oho no violasaun seksual. Projekto Shwe laiha pengecualian. Ami la fiar katak Governo Korea, Korporasaun Gas Korea ka Daewoo Internasional hakarak halo osan nebe'e hetan kontaminasaun ho ran husi krime sira, tan ne'e ami husu atu imi sai husi imi nia involvimento.

Iha tinan ruanulu liu ba, Korea ho Timor-Leste foin sai husi ditadura militar atu hetan demokrasia ida nebe'e iha dame. Imi nia povo ho ami hatene diak kona ba necessidade atu luta hodi atinge no proteje direitu humanus, no importansia husi solidariedade internasional ba luta ida ne'e. Maibe durante periodo ida hanesan, ditadura militar iha Burma hetok hametin liu tan nia forsa no aumenta tan opresaun ba nia povo sira.

Timor-Leste, Korea no Burma iha buat balun nebe'e hanesan: Ita nia nasaun iha lider balu nebe'e simu Nobel da Paz. Ida mak sai ona Presidente Republika Korea, ida seluk mak Ministro Negosios Estrangeiros Timor-Leste nian. Maibe ditadura militar sei kaer Aung San Suu Kyi kastigo iha uma no halo opresaun barak ba ninia apoiantes sira iha dekade balu, maske votantes sira Burma hili nia nudar presidente.

Nune'e, ami husu ba Governo Republika Korea no Daewoo Internasional atu hapara imi nia apoio ekonomia no politika ba ditadura militar liu husi termina imi nia Projekto Shwe Gas.

Obrigada ba imi nia atensaun, no ami hein tebes imi nia resposta.

Sinceramente,

Asina husi representante Organisasun NGO no estudante tuir mai ne'e:

Asosiasaun HAK

Bibi Bulak

CPD-RDTL

Fokupers

Forum Communication University

Forum University of TL (FUTL)

Grupo Feto Foinsa TL (GFFTL)

Ikatan Mahasiswa Bobonaro (Kesdib)

Ikatan Mahasiswa Viqueque (QUISFIK)

Instituto Sahe ba Libertaun (SIL)

Judicial System Monitoring Programme (JSMP)

Kdadalak Sulimutuk Institute (KSI)

La'o Hamutuk

Labor Advocacy Institute for East Timor (LAIFET)

Liga Foinsa ba Liberta Povo (LISFLIPO)

Movimento Juventude Estudante Lautem

(MUJEDTIMO)

Pergerakan Solidaritas Mahasiswa TL (PSMTL)

Radio Rakambia

Rede Feto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Senat ARI

Senat Maulear

Senat UNDIL

Senat UNTL

Uniaun Estudante Distrito Ainaro

Unidade Universitariu Lautem (UNILAU)

Keluarga Korban TNI Timor-Leste Mengunjungi Indonesia

Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional adalah koalisi sejumlah organisasi non-pemerintah dan perorangan yang bekerja dengan para korban kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi di Timor-Leste sepanjang 1999 untuk memperjuangkan keadilan dan pembentukan pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut. Aliansi melakukan kampanye nasional dan internasional untuk mengkritik tidak memadainya proses Pengadilan Ad Hoc Indonesia, Panel Khusus Timor-Leste/PBB untuk Kejahatan Berat (lihat *Buletin La' o Hamutuk* Vol. 5, No. 3-4, Oktober 2004), Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR, lihat *Buletin La' o Hamutuk* Vol. 4, No. 5, November 2003), dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan dua negara (CVA, lihat *Buletin La' o Hamutuk* Vol. 6, No. 3, Agustus 2005). Aliansi menganggap bahwa pengadilan internasional adalah satu-satunya cara yang efektif untuk mencapai keadilan bagi para korban dan pertanggungjawaban bagi orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap umat manusia.

Untuk mencapai tujuan Aliansi diperlukan banyak upaya dan memakan banyak waktu. Tetapi Konstitusi Timor-Leste (Pasal 160) secara jelas menyatakan prinsip bahwa para pelaku kejahatan terhadap umat manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sejauh ini pemerintah Timor-Leste enggan untuk bertindak sesuai dengan prinsip itu, tetapi menjalankan apa yang dipandang sebagai kepentingannya dan kepentingan pemerintah Indonesia. Namun, Aliansi tidak menerima sikap pemerintah, dan memandang faktor politik internasional dan kesulitan teknis sebagai hambatan yang harus diatasi. Perjuangan mereka didasarkan pada prinsip yang sama pentingnya dengan perjuangan selama 24 tahun untuk kemerdekaan Timor-Leste.

Baru-baru ini Aliansi mengadakan kunjungan yang mempertemukan keluarga korban Timor-Leste dengan keluarga korban Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta pada akhir bulan Agustus. Aliansi mengirimkan lima orang ke Jakarta, termasuk wakil dari Perkumpulan HAK dan *La' o Hamutuk*, serta keluarga orang-orang yang dibunuh pada 1999 di Gereja Liquiça, Dili, dan Maliana. Korban-korban Indonesia termasuk dari pembunuhan massal pada tahun 1945, 1965, pembunuhan di Universitas Trisakti (1998) dan Semanggi I & II (1998). Para korban juga mendiskusikan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh kedua pemerintah.

Pertukaran tersebut diorganisir oleh Komisi Nasional untuk Orang Hilang (KONTRAS) di Indonesia dan Perkumpulan HAK di Timor-Leste, dengan harapan membentuk jaringan yang kuat antara organisasi-organisasi non-pemerintah yang memiliki tujuan yang sama. Development and Peace, badan Katolik Kanada, menyediakan dana untuk kunjungan tersebut.

Selain untuk pertukaran informasi, pertemuan tersebut berharap untuk:

- √ Memperkuat persahabatan antar korban
- √ Merencanakan strategi untuk masa mendatang

- √ Meningkatkan semangat solidaritas dalam kerja mereka untuk keadilan dan pembentukan pengadilan internasional
- √ Meningkatkan kesadaran di kedua negara tentang pentingnya menentang impunitas.

Di Jakarta, delegasi Aliansi bertemu dengan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Delegasi juga menghadiri sidang pengadilan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir (lihat *Buletin La' o Hamutuk* Vol. 5, No. 3-4, Oktober 2004), dan bertemu dengan diplomat-diplomat dari Amerika Serikat, Swiss, Inggris, Australia, dan Uni Eropa.

Para diplomat menanyakan pandangan tim tentang kekerasan yang terjadi pada 1999. Korban dari dua negara secara kuat menekankan perlunya pengadilan internasional untuk mencapai proses peradilan yang adil. Tim juga menyampaikan pandangan mereka tentang Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Comissão de Verdade e Amizade – CVA). Wakil dari Indonesia menyatakan bahwa mereka ingin membentuk Komisi Rekonsiliasi Indonesia, untuk melengkapi dukungan mereka bagi pengadilan internasional untuk mengadili mereka yang melakukan kejahatan terhadap umat manusia di Timor-Leste. Pada akhir pertemuan, wakil dari Timor-Leste kembali menyatakan tujuan mereka untuk melanjutkan perjuangan bagi keadilan untuk para korban di Timor-Leste.

Pada 1 September, Aliansi bertemu dengan anggota-anggota KWI, termasuk Uskup Mgr. Turang, yang menjadi CVA. KWI menyarankan agar korban-korban dari Timor-Leste mengirimkan surat kepadanya tentang situasi di Timor-Leste pada 1999. Baik korban dari Indonesia maupun Timor-Leste menyampaikan ketidakpuasan mereka atas pembentukan komisi oleh kedua pemerintah itu. Komnas HAM menyatakan bahwa CVA tidak mempunyai legitimasi dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah keadilan bagi korban di kedua negara.

Secara keseluruhan, para korban dari kedua negara memiliki pandangan dan tujuan yang mirip. Keduanya percaya bahwa CVA tidak punya legitimasi dan tidak akan menjadi saluran bagi orang-orang yang mencari keadilan. Untuk masa mendatang, mereka memutuskan untuk membentuk Aliansi Bersama korban dari kedua negara, meningkatkan solidaritas dalam tindakan, dan menyelenggarakan lokakarya untuk menyusun strategi bersama.

Kesimpulannya, kita belajar bahwa pertukaran informasi dan jaringan dengan organisasi-organisasi pemerintah itu penting untuk mencapai tujuan. Korban-korban di Indonesia secara kuat mendukung upaya rakyat Timor-Leste untuk pembentukan pengadilan internasional. Mereka mengatakan bahwa proses ini akan membantu terjadinya perubahan di Indonesia dalam upaya mereka untuk mewujudkan demokrasi, yang merupakan contoh mengenai solidaritas dalam perjuangan rakyat kedua negara. ❖

Keadilan “yang Mudah Dipraktekkan” untuk Timor-Leste

Pada tanggal 17 Oktober 2005, Wakil Khusus Sekretaris Jendral PBB untuk Timor-Leste mengundang empat organisasi non-pemerintah lokal untuk mendiskusikan tuntutan keadilan. Hasegawa mengumpulkan informasi dalam rangka menanggapi surat terbaru dari Presiden Dewan Keamanan PBB yang meminta Sekretaris Jendral merekomendasikan “pendekatan-pendekatan yang mudah dipraktekkan” terhadap tuntutan keadilan berdasarkan laporan dari Komisi Ahli dan pandangan-pandangan Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia. SRSG meminta masing-masing organisasi untuk membuat daftar keprihatinan utama, yang akan ia sampaikan ke New York. *La’o Hamutuk* menulis sebagai berikut:

La’o Hamutuk

Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor Lorosa’e

P.O. Box 340, Dili, Timor Leste

Tel: +670-3325013 or +670-7234330

email: info@laohamutuk.org



20 Oktober 2005

Sr. Sukehiro Hasegawa
Wakil Khusus Sekretaris Jendral PBB
Obrigado Barracks, Dili, Timor-Leste

Yang Terhormat Sr. Hasegawa:

Terima kasih atas waktu yang diberikan pada Hari Selasa lalu untuk mendengarkan perhatian kita berkenaan dengan keadilan bagi kejahatan-kejahatan yang terjadi di Timor-Leste. Sebagaimana anda minta, berikut poin-poin paling penting yang diyakini oleh La’o Hamutuk harus diperhatikan oleh Sekretariat:

- 1) Keadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor-Leste selama pendudukan Indonesia dan setelah referendum menyisakan pertanggungjawaban yang tidak dipenuhi oleh masyarakat internasional, dan tidak dapat dipindahkan kepada Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia yang berulang kali menunjukkan tidak dapat melaksanakan “pendekatan yang mudah dipraktekkan” sesuai kewajiban hukum.
- 2) Komisi dua negara, yaitu Komisi Kebenaran dan Persahabatan tidak berkaitan dengan keadilan dan seharusnya tidak menjadi alasan atau penyimpangan dari proses-proses peradilan. PBB seharusnya tidak mengakui badan politik ini dengan melibatkan diri dalam segala cara. Selanjutnya, kerahasiaan kesaksian para saksi dan bukti-bukti yang diberikan kepada PBB atau para penyelidik Unit Kejahatan Berat dan CAVR harus dilindungi.
- 3) Meskipun data-data Unit Kejahatan Berat harus dijaga dan dilindungi dengan ketat untuk proses-proses keadilan yang memungkinkan di masa depan, melanjutkan penyelidikan Unit Kejahatan Berat pada saat ini berguna hanya jika masyarakat internasional bersedia untuk menekan secara politik, diplomatik, dan atau ekonomi kepada Indonesia untuk memastikan bahwa para tersangka pelaku kejahatan diajukan ke pengadilan. Sebagaimana diminta oleh banyak rakyat Indonesia, berbagai tekanan akan mempercepat proses demokrasi di Indonesia, dan meningkatkan hubungan Indonesia dengan Timor-Leste dan negara-negara lain di masa yang akan datang.
- 4) Para korban dan keluarga korban telah melakukan usaha-usaha yang menyakitkan untuk memberikan bukti-bukti dan kesaksian kepada para penyelidik internasional. Sekarang pertanggungjawabannya kepada PBB untuk menghormati pengorbanan mereka dan memastikan adanya keadilan.
- 5) Ganti rugi kepada para korban akan sangat pantas, tetapi kompensasi ini harus datang dari para pelaku – para pelaku individu dan Pemerintah Indonesia – dan harus disertai dengan pengakuan-pengakuan secara jujur atas kesalahan yang dilakukan. Uang suap dari para penyandang dana internasional bukanlah pengganti keadilan.
- 6) Rakyat Timor-Leste paling menderita atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah terjadi. Masyarakat internasional tidak seharusnya cuci tangan dengan mengatasnamakan “kepraktisan.”
- 7) Sekretariat PBB harus membuat rekomendasi-rekomendasi sesuai hukum, keadilan dan kemudahan keuangan. Ini terserah pada Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan faktor-faktor politik. Kami menyerukan kepada anda untuk tidak menyensor diri anda sendiri atau menghindari kesimpulan-kesimpulan logis karena anda takut dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan yang enggan untuk memberikan pertanggungjawaban mereka. Seperti yang dilakukan oleh Komisi Ahli, anda harus merekomendasikan apa yang benar dan adil.

Terima kasih atas pertimbangan anda, dan kami menunggu kelanjutan dialog mengenai isu yang sangat penting ini.

Hormat kami,

Bella Galhos, Maria Afonso de Jesus, dan Charles Scheiner

Laporan Perkembangan Manusia Memberikan Wawasan bagi Timor-Leste

Laporan Perkembangan Manusia 2005 dari UNDP berisikan banyak informasi dan analisa yang menarik. Sebagaimana didiskusikan di tulisan Ketergantungan pada Minyak di halaman 1, Timor-Leste menempati urutan ke 140 dari 177 negara menurut Index Perkembangan Manusia, yang mengkombinasikan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Kami mencetak kembali dua grafik dari laporan ini karena berisi informasi penting bagi Timor-Leste.

Bantuan yang Mengikat

Grafik di sebelah kanan menunjukkan prosentase bantuan luar negeri dari para penyandang dana utama di dunia yang "mengikat" pembelian-pembelian atau layanan-layanan dari negara-negara penyandang dana. Kami mengkotakkan empat penyandang dana utama untuk Timor-Leste, yang merupakan para pelaku kejahatan paling buruk. Sebagaimana dinyatakan oleh UNDP, "Bantuan yang mengikat masih merupakan salah satu kekejaman yang paling buruk atas bantuan pembangunan yang fokus kepada kemiskinan. Dengan mengkaitkan bantuan pembangunan dengan ketentuan penyediaan dan jasa yang diberikan oleh negara-negara donor, selain mengijinkan para penerima dana untuk membuka pasar mereka, bantuan mencoba mengurangi nilai atas uang. Banyak para penyandang dana telah mengurangi bantuan mengikatnya, tetapi secara luas pada prakteknya masih lazim dan tidak ada laporannya. Dengan penaksiran yang hati-hati kami memperkirakan jumlah bantuan mengikat untuk negara-negara berpendapatan rendah sekitar lima hingga tujuh milyar dolar Amerika."

Bertentangan dengan beberapa masalah-masalah yang lebih sulit berkaitan dengan pembangunan, UNDP menyimpulkan "ada metode yang sederhana untuk menghentikan uang yang sia-sia berkaitan dengan bantuan yang mengikat: hentikan pada tahun 2006."

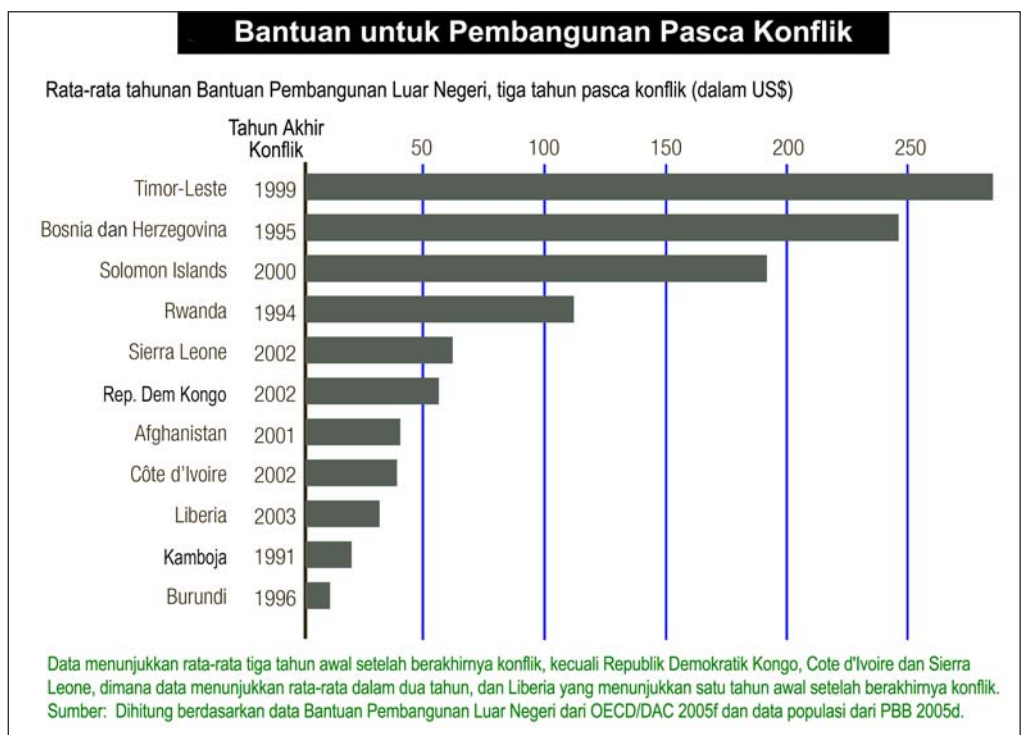
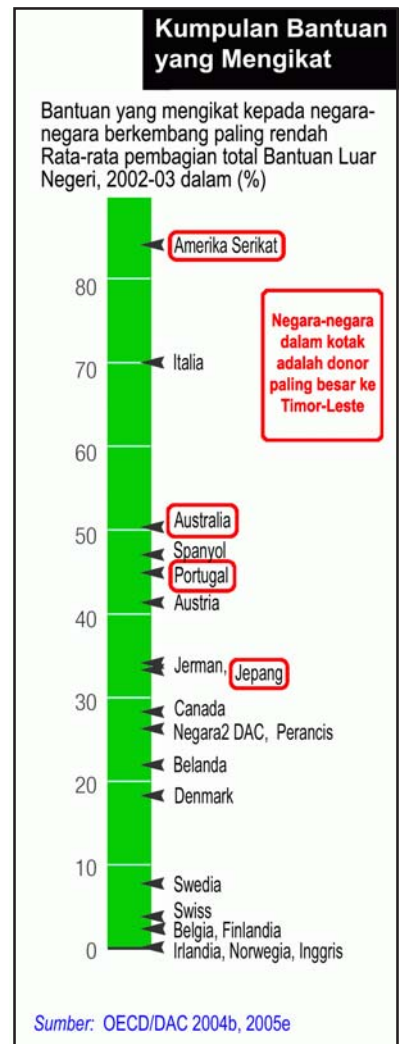
Bantuan Paska-Konflik

Grafik di bawah dari laporan yang sama, merupakan bagian dari diskusi mengenai bantuan internasional selama pembangunan paska konflik. Menurut UNDP, "Bantuan internasional penting diperlukan dalam masa membangun kembali. Tujuan pembangunan paska konflik adalah untuk mencegah terulang kembalinya kondisi sebelum krisis dan membangun pondasi bagi perdamaian yang tiada akhir."

Timor-Leste menerima jumlah bantuan per-orang paling tinggi dari negara-negara paska konflik di dunia. Jumlah ini tidak termasuk anggaran-anggaran Misi-misi PBB, sekitar dua kali lebih banyak. Bantuan itu sendiri sekitar jumlah yang sama dengan semua perekonomian negara-negara non minyak (Produk Domestik Bruto/kotor) selama jangka waktu tersebut.

Dalam istilah internasional, laporan UNDP mengarahkan beberapa masalah dengan bantuan yang telah ditulis *La'o Hamutuk* beberapa tahun terakhir: "Prioritas utama di setiap negara paska konflik adalah mengembangkan kemampuan kelembagaan dan pertanggungjawaban kepada penduduk lokal. Ketika para penyandang dana memilih untuk bekerja 'di luar anggaran', melalui proyek-proyek, dan menciptakan struktur yang sejajar dalam pelaporan, audit, dan mendapatkan barang-barang, mereka meremehkan pembangunan struktur kelembagaan yang membuat perdamaian dan keamanan tergantung pada bantuan. Bahaya dari sikap menghakimi yang lemah oleh para penyandang dana itu akan melingkupi masalah berat yang mereka ingin arahkan: melemahnya struktur negara dan kemampuan lokal."

Karena bantuan kepada Timor-Leste menurun dan kami berpikir kemana bantuan-bantuan tersebut pergi, laporan UNDP mendukung pengamatan-pengamatan *La'o Hamutuk*. Semoga menjadi pelajaran yang berharga. ❖



mendatang bahwa mereka dapat menjalankan kebebasan berekspresi mereka tanpa mendapatkan hukuman. Di tahun-tahun mendatang ini bisa menyulitkan karena dukungan donor semakin berkurang.

AusAid telah mengundang pemohon untuk tahun ini, tetapi organisasi-organisasi lokal yang mengajukan permintaan untuk hibah tersebut akan melakukannya dengan pengetahuan bahwa pernyataan publik mereka akan diperiksa secara teliti. Banyak organisasi non-pemerintah di Timor-Leste kini takut untuk menggunakan hak kebebasan berbicara mereka.

AusAID menyatakan bahwa tujuan utama bantuannya untuk Timor-Leste adalah untuk membangun sistem peradilan dan hukum yang mendukung hukum dan ketertiban.

Penolakan Australia untuk mengikuti prinsip hukum dalam perundingan mengenai Laut Timor adalah tindakan menghina hukum dan ketertiban itu sendiri.

AusAID membatalkan kesepakatannya dengan FTM, walaupun tidak ada ketentuan dalam kontrak yang menyebutkan begitu. Ini juga melecehkan tujuan yang dinyatakan Australia untuk membangun institusi pengawasan di sektor hukum untuk memantau pengadilan yang bertanggung jawab untuk memberlakukan kontrak.

Pemerintah Australia harus menghormati tujuan-tujuan yang dikatakannya dan perjanjian yang dibuatnya di negara kami, dan menghormati hak rakyat untuk menyuarakan pendapatnya. Ia tidak boleh menggunakan politik luar negerinya untuk menghalangi bantuan di bidang yang sangat dibutuhkan. ❖



Pada 6 Oktober 2005, *La'o Hamutuk* dan Forum Tau Matan (FTM) menyelenggarakan konferensi pers di kantor NGO Forum di Dili untuk mengeluarkan informasi di atas. Konferensi pers itu diberitakan oleh surat kabar di Timor-Leste, radio Timor-Leste dan Australia, dan di *Sydney Morning Herald*. Dari kiri ke kanan: Elias Barros (Proyek Pemantauan Penjara FTM), Santina Soares (*La'o Hamutuk*), João Pequino (Direktur Eksekutif FTM).

Organisasi Perdagangan Dunia Diungkapkan di Ermera

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO) adalah salah satu organisasi yang berkuasa di dunia. Organisasi ini dibentuk dan dikuasai oleh negara-negara yang paling kaya dan paling berkuasa. Salah satu misi dari WTO adalah mengatur produksi pertanian dan sistem pemasaran seluruh dunia. Selama bekerja lebih dari 10 tahun WTO telah memberikan dampak yang negatif terhadap produksi pertanian dan pasar di negara-negara berkembang.

Agar bisa belajar lebih banyak tentang hal ini, Jaringan Pertanian Berkelanjutan HASATIL menyelenggarakan konferensi tentang WTO pada 25-26 September di Ponilale, Distrik Ermera. Konferensi ini dihadiri oleh pemerintah, anggota Parlemen Nasional, dan organisasi-organisasi masyarakat. Konferensi ini mempunyai beberapa tujuan:

- √ Meninjau sejarah WTO dan dampaknya pada kebijakan pertanian di negara-negara Dunia Ketiga.
- √ Meneliti bagaimana membuat pasar menjadi yang lebih adil.

- √ Memperkuat hubungan dan solidaritas antar petani di Timor-Leste.
- √ Memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat mengenai pandangan pemerintah tentang pembangunan pertanian, yang berhubungan dengan keamanan pangan dan reformasi tanah.
- √ Mendorong Pemerintah Timor-Leste agar tidak menjadi anggota WTO.

Pada akhir konferensi, Egidio de Jesus, Sekretaris Negara untuk Wilayah Tiga (Dili, Ermera, dan Liquiça) menyatakan bahwa pemerintah Timor-Leste belum memutuskan apakah akan menjadi anggota WTO. Ia juga menyarankan agar HASATIL menyelenggarakan penelitian tentang pendapat rakyat mengenai WTO, dan meminta HASATIL untuk mengajukan rancangan undang-undang untuk melindungi produksi pertanian untuk dibahas oleh Pemerintah dan Parlemen. ❖

Australia semestinya mendukung proyek-proyek di Timor-Leste berdasarkan kebutuhan, bukan untuk menghadiah atau menghukum pernyataan-pernyataan publik dari organisasi-organisasi. Namun, beberapa bulan yang lalu Australia membatalkan satu bantuan dana hak asasi manusia untuk mencapai tujuan politiknya.

Australia, bersama dengan Jepang dan Portugal, adalah salah satu donor terbesar untuk Timor-Leste sejak 1999. Australia menyalurkan bantuan dana melalui AusAID (The Australian Agency for International Development – Badan Australia untuk Pembangunan Internasional), dan secara terpisah memberikan kerjasama di bidang pertahanan. (Lihat *La'o Hamutuk* Vol. 3, No. 8, Desember 2002).

Baru-baru ini AusAID menginformasikan kepada satu organisasi non-pemerintah Timor-Leste bahwa dana yang telah dijanjikan di bawah skema Hibah Kecil Hak Asasi Manusia AusAID, yang diberikan setiap tahun kepada organisasi-organisasi di Asia Pasifik yang misi utamanya hak asasi manusia dan keadilan sosial, tidak akan diberikan kepada organisasi itu.

La'o Hamutuk kemudian mengetahui bahwa dukungan AusAID untuk hak asasi manusia di Timor-Leste menunjukkan bahwa organisasi penerima tidak boleh mengungkapkan pandangan politik yang tidak disetujui Australia.

AusAID menarik kembali dana yang dijanjkannya kepada Forum Tau Matan (FTM) karena FTM ikut menandatangani siaran pers yang berjudul “Masyarakat Sipil Timor-Leste Menuntut Batas Laut Yang Adil” pada bulan September 2004. Ini setelah keluarnya instruksi dari Canberra untuk membatalkan pemberian dana itu, setelah AusAID dan FTM menandatangani kontrak.

Enam bulan sebelumnya, pada Hari Hak Asasi Manusia Sedunia (10 Desember 2004), Australia mengumumkan bahwa FTM akan menerima dana sebesar A\$65.800 (sekitar US\$49.500) untuk memantau sistem peradilan dan kondisi penjara.

Memantau sistem peradilan akan melengkapi kegiatan memantau kondisi penjara: banyak tahanan di dalam penjara, yang belum diadili dalam sistem peradilan Timor-Leste karena beban kasus yang menumpuk dan terbatasnya kemampuan. Kalau saja FTM menerima dana tersebut, pemantauan mereka akan membantu diberikannya perhatian pada masalah-masalah yang saling berkaitan ini. Kerja ini merupakan bagian dari misi FTM untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

Pada 15 Desember 2004, AusAID memberitahu FTM bahwa FTM diberi hibah itu. FTM dan AusAID menandatangani kontrak pada bulan Januari 2005, meskipun kelambanan birokrasi menyebabkan dana belum diberikan kepada FTM.

Pada 7 Juni 2005 AusAID menulis surat kepada FTM yang menjelaskan bahwa dana yang telah disetujui dibatalkan. Dalam surat tersebut AusAID menjelaskan bahwa “kami tengah mengkaji kembali langkah-langkah kami berhubungan dengan NGO di sektor-sektor yang berbeda.” FTM kemudian menanyakan mengapa dana tersebut dibatalkan, tetapi AusAID Dili tidak menjelaskan alasan yang sebenarnya mengapa dana tersebut dibatalkan hingga tujuh minggu kemudian mereka menerima penjelasan dari Canberra.

Antara Januari dan Juni, FTM melakukan kegiatan dengan anggapan bahwa mereka akan menerima dana dari AusAID. Untuk pembatalan kontraknya, AusAID memberikan dana kepada FTM A\$7.000, kira-kira 10% dari dana yang sebelumnya telah disepakati. FTM tidak mencari sumber dana lain karena mereka mengharapkan dana dari AusAID untuk menutupi anggaran mereka untuk tiga tahun mendatang.

Semua penerima dana di negara-negara lain di Asia Pasifik menerima dana sesuai skema yang telah disepakati.

Melalui tindakan mereka, Pemerintah Australia mengirimkan pesan kepada organisasi-organisasi penerima dana bahwa mereka tidak ingin terjadi penentangan pendapat oleh organisasi yang menerima dana mereka. Ini bertentangan dengan hak kebebasan berbicara, yang tercantum dalam konstitusi Australia dan Timor-Leste, serta Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

La'o Hamutuk menyerukan kepada Australia untuk menghormati komitmennya pada hak asasi ini dengan secara publik menjamin para penerima dana sekarang dan di masa

(bersambung ke halaman 15)

Apakah *La'o Hamutuk* itu?

La'o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor Lorosa'e yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosa'e yang efektif. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf *La'o Hamutuk* baik itu staf Timor Lorosa'e maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji. Terakhir, *La'o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

La'o Hamutuk mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. Buletin dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La'o Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor Lorosa'e serta masyarakat internasional.